BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).¹

Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera.

Didalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²

Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi

¹Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

²Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, hlm. 68

kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.³

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.⁴

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁵

Istilah korupsi dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi”, adapun istilah lain dari korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio*, istilah korupsi muncul di beberapa bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, dan

³http://www.academia.edu/8838989/Indonesia_sebagai_negara_hukum_INDONESIA_SEBAGAI_NEGARA_HUKUM, Diunduh Pada Hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 22.20 WIB

⁴Evi Hartanti, 2000, *Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

⁵*Ibid.*

corruptie dalam bahasa Belanda., gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harifiah dari korupsi dapat berupa:

1. Korup (busuk, suka menerima uang suap atau uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri atau sebagainya)
2. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya)
3. Koruptor (orang yang korupsi)⁶

Korupsi, merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita dan sudah menjadi rahasia umum di masyarakat, baik rakyat kecil, menengah maupun atas dan tidak terkecuali para aparat penegak hukum, mungkin dapat dikatakan bahwa korupsi bukan sesuatu yang tidak aneh lagi didengar.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas, masif, dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya penanggulangannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dengan cara yang luar biasa (*extra ordinary*)⁷.

Dampak dari tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinarycrime*):

⁶*Ibid.*,8.

⁷Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit CV.Eko Jaya, Jakarta, 2002

- a. Menurut Susan Rose-Ackerman, korupsi dapat menyebabkan ketidakefisienan dan ketidakadilan yang dapat merusak legitimasi politik negara
- b. Soemarjan menyatakan, korupsi, kolusi dan pungli tidak saja dapat meruntuhkan kewibawaan negara dan pemerintah, tapi juga dapat mengakibatkan *high cost economy* yang menaikkan harga produk dan menurunkan daya saing bisnis.
- c. *Asian Development Bank* dalam kebijakan anti korupsi menyatakan bahwa tindakan korupsi secara khusus menimbulkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan pada pembangunan suatu negara.⁸

Korupsi sudah melanda negeri ini sejak lama dan hampir menyentuh semua lini kehidupan masyarakat dan berlangsung terus dalam bentuk yang lebih rumit dan canggih. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab sulitnya memberantas tindak pidana korupsi ini. Sepertinya, korupsi sudah sampai pada apa yang disebut oleh Robert Klitgaard sebagai “budaya korupsi”. Yang dimaksud Klitgaard disini bukan pada hakikat keberadaan “budaya” atau semua orang Indonesia melakukan korupsi sehingga sulit untuk diperangi dengan cara apa pun karena kadangkala situasi kondusif yang menjadikan korupsi itu merasa nyaman keberadaannya di tengah-tengah masyarakat karena korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.⁹

⁸Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Susan Rose-Ackerman, 1999, Ekonomi Politik Korupsi, dalam “Korupsi dan Ekonomi Dunia” Kimberly Ann Elliot, Pengantar dan Penerjemah A. Rahman Zainudin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 63. Selo Soemarjan, dalam Robert Klidgaard *Controlling Corruption*, terbitan Univ of California, 1978, hlm. XIII, Asian Development Bank, hlm. 20.

⁹Robert Klitgaard, 2005 *Membasmi Korupsi* (terjemahan), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.82-85.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pernah dijuluki “undang-undang sapu jagat” karena terlalu luas jangkauannya. Karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, undang-undang itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di samping itu, ada juga Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Dari undang-undang itu muncul lembaga Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Kemudian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pasal yang mengatur KPKPN, yaitu pasal 10 sampai pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Begitu pula Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tim Gabungan dinyatakan tidak berlaku dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bila di cermati dari awal sampai akhir tidak ada perubahan yang signifikan dilihat pada Rezim Orde Baru yang dinilai otoriter dan korup telah melakukan proses feodalisasi hukum secara sistematis. Di era reformasi saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Berarti secara sadar hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup. Merajalelanya korupsi menandakan para aparat hukumnya lemah. Menyalahkan atau mengubah undang-undang memang lebih mudah daripada menyeret koruptor ke muka pengadilan. Tidak ada pemberantasan korupsi yang efektif, ini merupakan hal

yang sangat ironis, mengingat tujuan reformasi adalah pemberantasan KKN. Ini juga menunjukkan pemerintahan yang lebih demokratis tidak serius memberantas korupsi¹⁰.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak hanya bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei *Transparency International Indonesia (TII)* menunjukkan, Indonesia merupakan Negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu di tingkat dunia, Negara-negara ber IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik seperti Angola, Azerbaijan, Tajikistan, dan Haiti.¹¹

Sebagai Negara terkorup keenam dari 133 negara yang disurvei pada tahun 2003 oleh Transparency International (TI) yang berbasis di Berlin, Jerman IPK RI sejak 2001 hinggasekarang masih tetap berada di angka rendah 1,9. Nilai indeks persepsi korupsi Indonesia adalah 1,9 dari rentang nilai 1-10. Dengan nilai itu. Indonesia masuk dalam ranking 122 dari 133 negara yang disurvei. Peringkat itu disebabkan oleh korupsi dari level atas kebawah yang begitu menjamur di Indonesia. Tiga sektor paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan. Sementara itu, kecenderungan masyarakat

¹⁰*Ibid.*, hlm. 3.

¹¹*Ibid.*, hlm. 2.

memberikan suap paling banyak terjadi di sektor nonkonstruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan, dan properti.¹²

Dalam penerapan hukum yang didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan hukum formal dan materil pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga instansi yang mengatur penegakan hukum yang menangani korupsi seperti: Polisi, Jaksa, Hakim, KPK, Tim Tas Tipikor, dan lembaga terkait seperti: BPK, BPKP, PPATK, termasuk lembaga Advokasi, LSM, lembaga control internal dan eksternal lainnya. Pada tahap penyidikan misalnya, terdapat berbagai institusi penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dengan demikian permasalahan hukum yang kemudian muncul dengan adanya pengaturan masing-masing negara penegak hukum tindak pidana korupsi tersebut adalah terjadinya berbagai kesenjangan dalam finansial kapital, tumpang tindih kewenangan dan atau perbedaan batas kewenangan yang parsial dalam penyidikan tindak pidana korupsi, karena memiliki hukum acara masing-masing disamping akibat lemahnya integritas.¹³ Penegak hukum tersebut, oleh karena itu, tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dicapai secara efektif, bahkan sangat kecil dibanding dengan harapan masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.

¹²*Ibid.* hlm. 3.

¹³ P. Pope, 2003, *Strategi Pemberantasan Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Transparansi Internasional Indonesia*, Yayasan Obor Pancasila, Jakarta, hlm. 71

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki “*dual functions*” dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, yakni sebagai Penyidik sekaligus Penuntut Umum, kondisi ini menempatkan kejaksaan memiliki peran strategis untuk menentukan kecepatan, ketetapan, dan tingkat keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, peran ganda Kejaksaan sebagai Penyidik dan Penuntut Umum perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, professional dan menjunjung tinggi hati nurani, mengingat tujuan penegakan hukum bukan sekedar mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan keadilan (*gerechtigheid*), tetapi juga mewujudkan kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*).¹⁴

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul, :”**PERAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH)**

¹⁴ Widyo Pramono, 2016, *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Kompas, Jakarta, hlm. 116-117

¹⁵ Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 255.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan memperkecil terjadinya kekeliruan permasalahan yang dikemukakan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan ke dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran jaksa dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ?
2. Apa saja hambatan-hambatan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis solusi dalam mengatasi kelemahan dan kendala jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dan sebagai revesensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Terutama peran jaksa dalam menangani kasus korupsi
- b. Penelitian ini untuk memenuhi tugas penulisan hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penegak hukum dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan serta informasi kepada publik tentang peran jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi

c. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber bacaan bagi mahasiswa untuk memperluas pengetahuan mereka tentang peran jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan penelitian yang kajiannya lebih luas dan mendalam.

E. Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan berbagai data suatu penelitian diperlukan metode yang sangat tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum pada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam masyarakat.¹⁶

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha untuk menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran kejaksaaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian diamati, diteliti dan dianalisis dalam praktek pelaksanaannya di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif, sebab Peneliti dalam menganalisa berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek yang menjadi pokok permasalahan. Objek

¹⁶Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 34

yang dimaksud disini yaitu tentang peran Jaksa sebagai penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti maupun fakta yang diperlukan dalam penelitian ini, maka Penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 14 Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan secara yuridis sosiologis, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan ataupun yang terkait. Dalam hal ini adalah pegawai kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Adapun pengertian dari wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.¹⁷

¹⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, di unduh pada hari selasa tanggal 29 Agustus 2017 pukul 23.43 WIB

b) Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca referensi dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan, Data sekunder ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- h) Peraturan Jaksa Agung RI (PERJA) Nomor: Per-067/A/JA/07/2007 tentang kode perilaku jaksa
- i) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi dari penulisan hukum ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penunjang yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya adalah : Referensi, Literatur, Artikel-artikel, Buku-buku, Jurnal-jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Wikipedia, dan lain-lain.

5. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan data sekunder terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti kembali oleh Penulis. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya data-data tersebut diolah dan disajikan oleh penulis dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data-data yang sudah didapat.

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai peran jaksa sebagai penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi, Sejarah Kejaksaan RI, Pengertian Jaksa, Tugas dan Wewenang Jaksa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Etika Profesi Jaksa, Pengertian Penyidikan, Proses Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Sejarah Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, Jenis-jenis dan Ciri-ciri Tindak Pidana Korupsi, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu peran jaksa sebagai penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan hambatan-hambatan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan ini.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA